

Panduan Memberantas Korupsi
dengan Mudah dan Menyenangkan

semua

PRESIDEN
MENTERI
DOSEN
GURU
DPR
GUBERNUR
ARSITEK
BUPATI
MAHASISWA
DPR
DOSEN
MEN
WALIKOTA

ber-OKS!



Semua BISA ber-AKSI:

Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan

(c) Komisi Pemberantasan Korupsi 2014

Pengarah:

Komisioner KPK

Deputi Bidang Pencegahan

Penanggung jawab:

Dedie A Rachim

Supervisi:

Sandri Justiana

Dian Rachmawati

Gumilar Prana Wilaga

Penulis:

Tim SPORA Communication

Desain dan Ilustrasi:

Tim SPORA Communication

Diterbitkan oleh

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Kedeputian Bidang Pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H. R. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan 12920

www.kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id

Cetakan 1: Jakarta, 2014

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya,
diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya,
dan bukan untuk diperjualbelikan.

Buku ini dipersembahkan
untuk seluruh anak bangsa yang mendambakan
Indonesia makmur dan sejahtera, bebas dari korupsi.



Sekapur Sirih

Nosce te ipsum, kenali dirimu sendiri. Meski tak seorang pun tahu kapan kali pertama ungkapan melegenda itu muncul, rasanya kita semua sepakat bahwa seperti itulah seharusnya manusia bersikap. Siapapun dan di manapun, hendaknya seseorang harus mengenali diri sendiri sebaik mungkin.



Mengapa? Karena ketidakmampuan mengenal diri sendiri, ternyata bisa menjadi penyebab kegagalan. Inilah persoalan klasik yang harus segera diatasi. Tidak hanya di Kuil Apolo, di Delfi, Yunani, tempat pepatah itu terukir, namun juga di berbagai belahan lain di bumi ini, termasuk di negeri yang amat kita cintai ini. Bahkan, di belahan Cina pun, pepatah serupa ternyata bisa ditemui, "Zhi ren nan, zhi jig eng nan." Artinya, memang sulit mengenal hati orang lain, namun mengenal diri sendiri ternyata lebih sulit.

Dalam pemberantasan korupsi, "*know yourself*," tentu bukan pengecualian. Termasuk ketika masyarakat berkeinginan untuk berperan serta memberikan kontribusinya. Dengan terlebih dahulu mengenali diri sendiri, seseorang akan mengetahui potensi yang dimiliki, termasuk mengenai minat dan kemampuannya. Dan, pada akhirnya, dengan mudah pula baginya untuk memilih peran pemberantasan korupsi yang sesuai. Apakah akan mengambil peran represif, perbaikan sistem, atau edukasi dan kampanye. Jika sudah demikian, tentu pemberantasan korupsi pun, pada akhirnya bisa dilakukan dengan mudah dan menyenangkan.





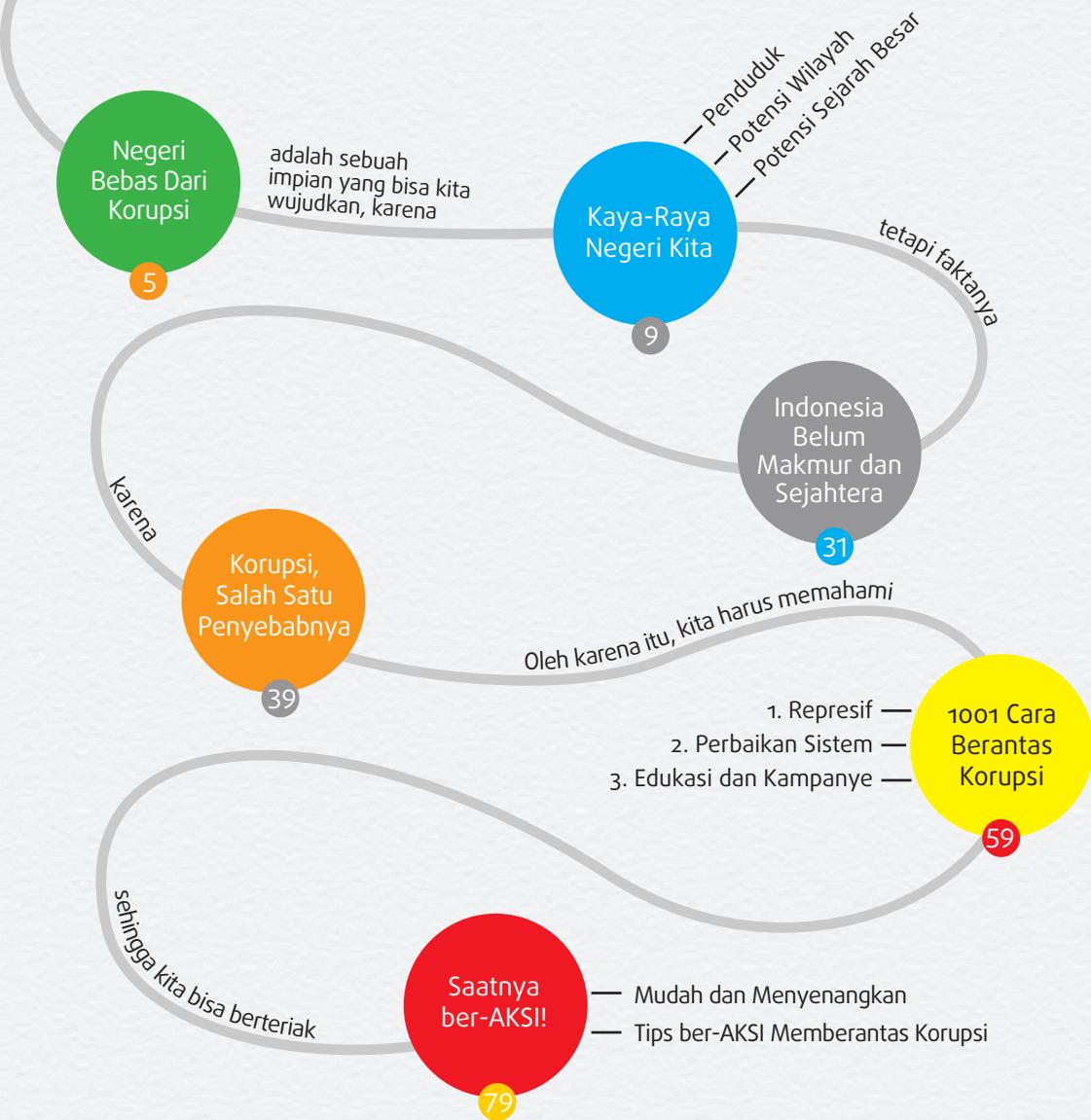
Kalau begitu tunggu apa lagi? Marilah berjuang bersama KPK, bahu-membahu memberantas korupsi. Siapapun, tanpa terkecuali. Karena setiap warga negara tentu memiliki kesempatan yang sama untuk membebaskan negeri ini dari cengkeraman korupsi.

Siapkah Anda? Kalau begitu, bekali dengan tekad dan komitmen. Jangan lupa juga, kenali baik-baik diri Anda, agar perjuangan berjalan efektif. Seperti seni berperang ala Sunzhi (*Sunzhi's Art of War*), bahwa "Di samping bisa membaca kekuatan dan kelemahan lawan, kita juga bisa mengetahui secara persis kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Jika demikian, seratus kali perang, seratus kali bisa menang."

Menyenangkan, bukan?

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Menu Buku



Sebelum Anda Membaca
Buku Ini...

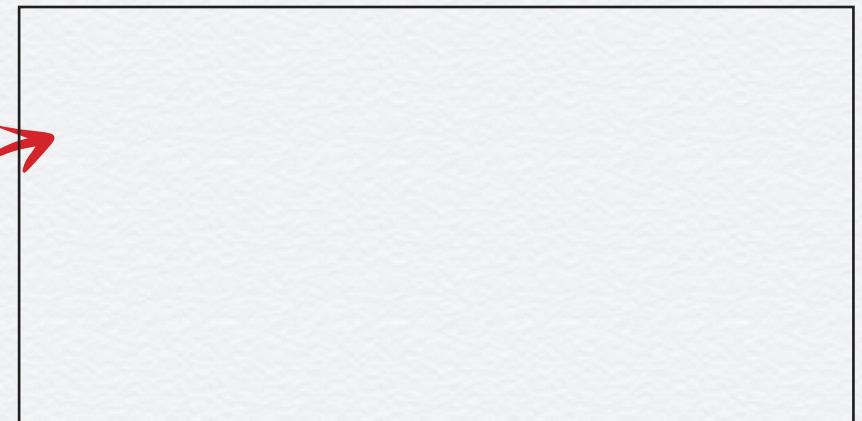
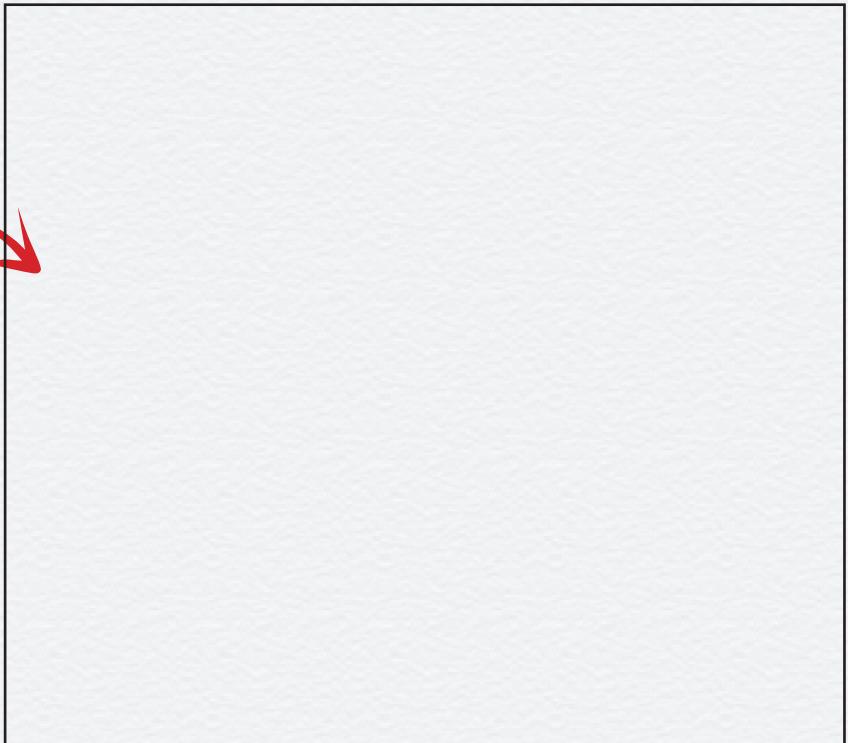
Tuliskan
nama Anda

Tempat menempelkan foto Anda

Apakah pekerjaan dan
aktivitas Anda sejari-hari?
Tuliskan di sini, ya!
Boleh jika ingin disampaikan
dalam bentuk gambar...

Keterampilan apa yang Anda kuasai?

Adakah pengalaman seru, berkesan, dan tidak terlupakan yang Anda alami ketika menggunakan keterampilan tersebut?
Ceritakanlah....



Apakah Anda punya hobi atau kegemaran?
Gambarkan atau tuliskan hobi Anda!

Orang-orang yang kuat mencari sesuatu
(potensi) di dalam dirinya sendiri.
Sementara orang yang lemah mencari
sesuatu (potensi) pada diri orang lain.

~ Confucius, Peribahasa Cina ~



NEGERI BEBAS DARI KORUPSI



Bayangkan beberapa tahun ke depan. Tak ada lagi kemiskinan di negeri ini. Rakyat hidup makmur, tenram, rukun, dan damai. Keramahan, kepedulian, dan gotong royong kembali menjadi sifat dasar bangsa ini di semua lapisan. Orangtua bekerja di kantor, di sawah, di pabrik, di rumah, dengan tenang, karena tahu impian mereka akan tercapai tak lama lagi. Dengan pikiran tenang, melakukan pekerjaan pun dengan penuh konsentrasi dan produktivitas meningkat.

Ramah, peduli, dan gotong royong adalah karakter bangsa Indonesia. Anak-anak bahagia di mana pun berada. Bersekolah dengan riang tanpa beban. Belajar bagi mereka adalah bermain. Kakak-kakak mereka, para remaja, berkumpul dan melakukan kegiatan kreatif menakjubkan.

Lingkungan bersih dari sampah. Udara segar tanpa polusi. Jalan-jalan lancar tanpa kemacetan. Alat transportasi umum yang nyaman dan tepat waktu membawa penggunanya tanpa harus berdesakan. Taman-taman kota terawat. Sawah ladang subur. Hutan kembali menghijau. Sungai jernih dan bersih mengalir. Kicau burung dan cericet hewan-hewan kecil meningkahi pemandangan. Rumah ibadah ramai dikunjungi segala usia. Perpustakaan juga menjadi tempat favorit keluarga. *Aaaah.... tariklah napas dalam-dalam.*



Oh ya, lihatlah para pejabat datang dengan pakaian sederhana, untuk berdialog dan mendengarkan rakyat, tak mau menerima perlakuan yang berbeda. Mereka mencatat keluhan dan segera menindaklanjuti dengan kerja keras. Tak ada amplop beredar di bawah meja karena mereka adalah abdi masyarakat yang sudah cukup menerima gaji yang layak.

Bagaimana dengan aparat keamanan dan penegak hukum? Mereka sibuk menjaga negeri ini dari ancaman luar. Tak boleh siapa pun dari luar mengisap kekayaan alam negeri ini karena semuanya milik rakyat dan digunakan hanya untuk kemakmuran rakyat.

Apakah itu utopia?



Inilah impian kita!

Tuliskan/gambarkan impian Anda mengenai Indonesia yang Adil dan Makmur, bebas dari korupsi.....



@KPK_RI #SIAPberAksi

Indonesia, bebas dari korupsi . . .



Bagaimana dengan negeri kita?

**KAYA
RAYA
NEGERI
KITĀ**



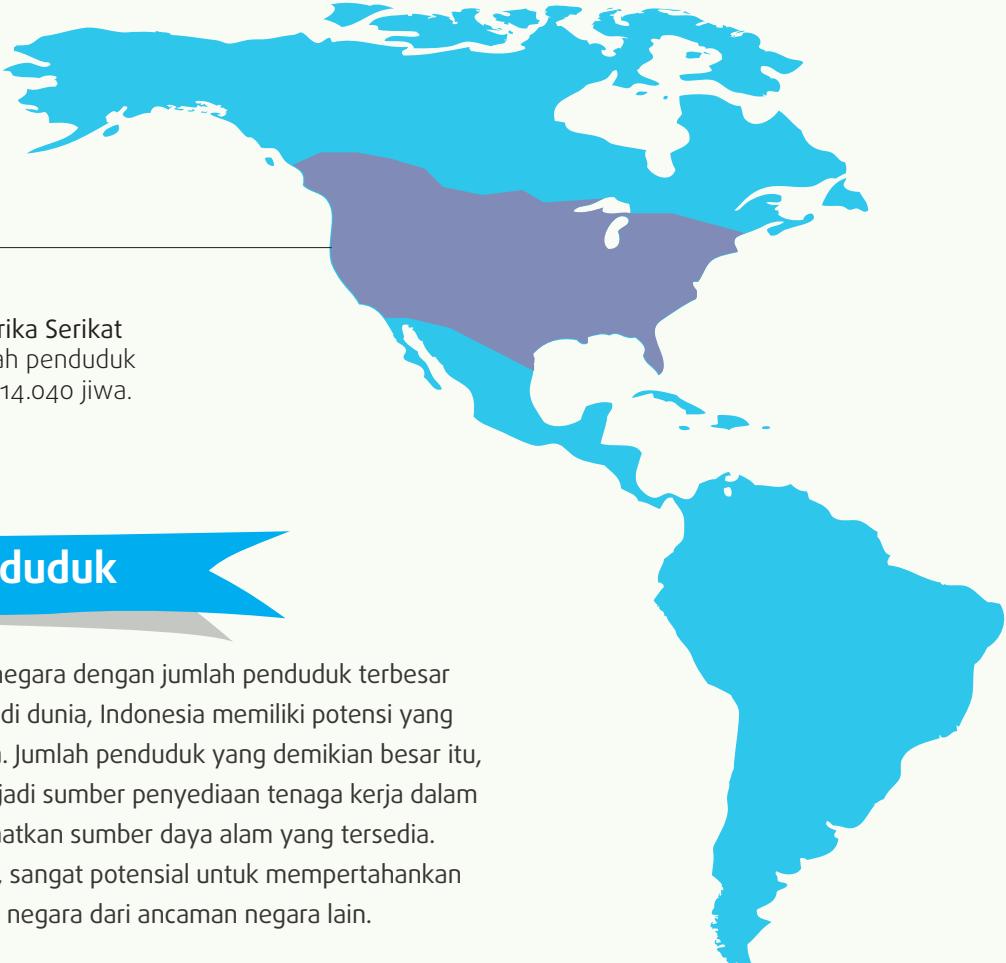
APA
BUKTI
INDONESIA
KAYA?

2. Potensi Wilayah

Tiga poin penting:

1. Penduduk

3. Sejarah Besar

- 
- 3 Amerika Serikat
Jumlah penduduk
313.914.040 jiwa.

Penduduk

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Jumlah penduduk yang demikian besar itu, bisa menjadi sumber penyediaan tenaga kerja dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, sangat potensial untuk mempertahankan keutuhan negara dari ancaman negara lain.





**Bayangkan jika 25% penduduk
Indonesia berpendidikan tinggi...**



Bayangkan jika 50% penduduk berlaku
jujur dan tidak melakukan korupsi...



Bayangkan jika 3% penduduk
menjadi wirausaha...

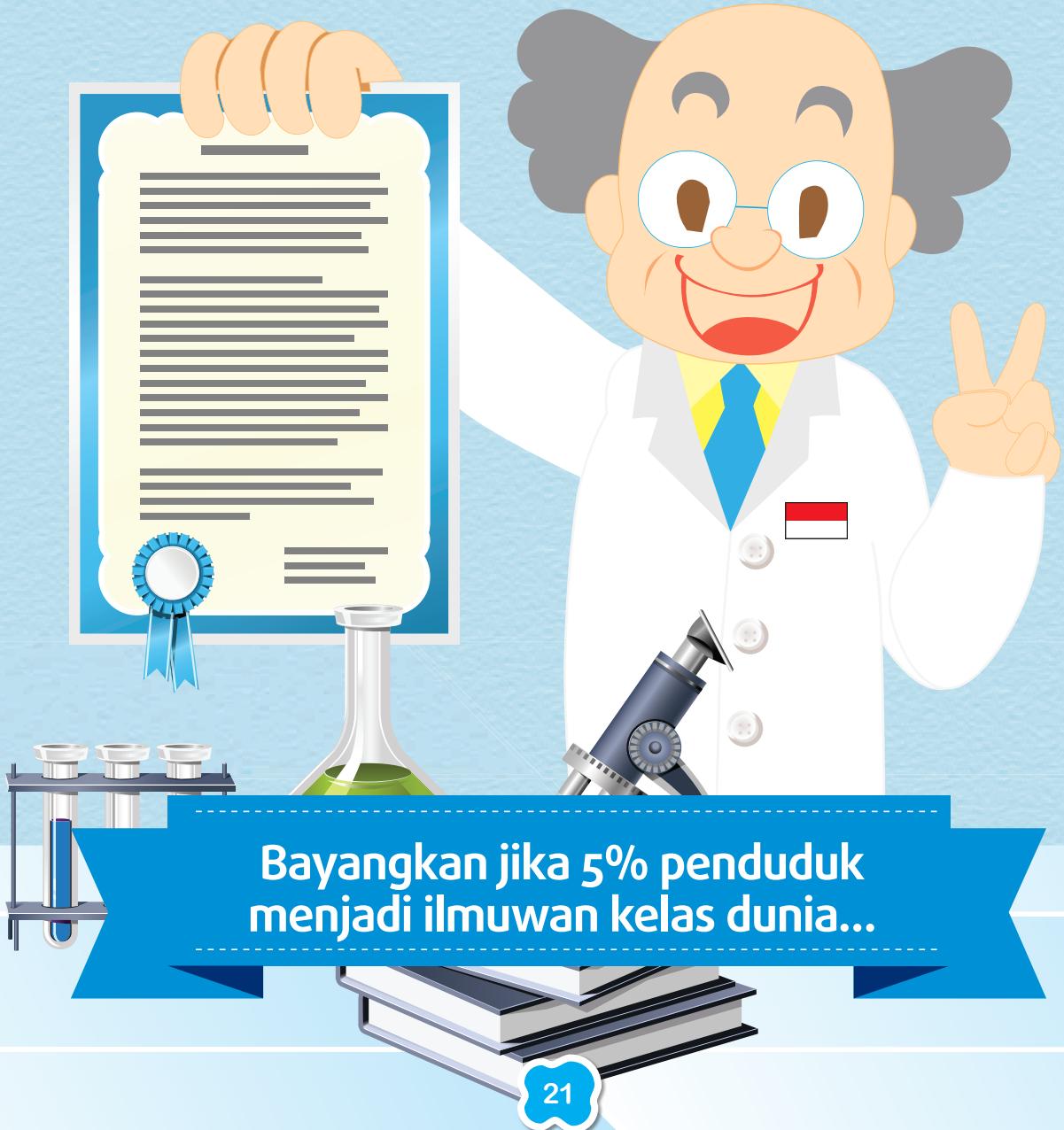


Bayangkan jika 0.05% penduduk
memiliki kemampuan bermain bola
setara Lionel Messi...



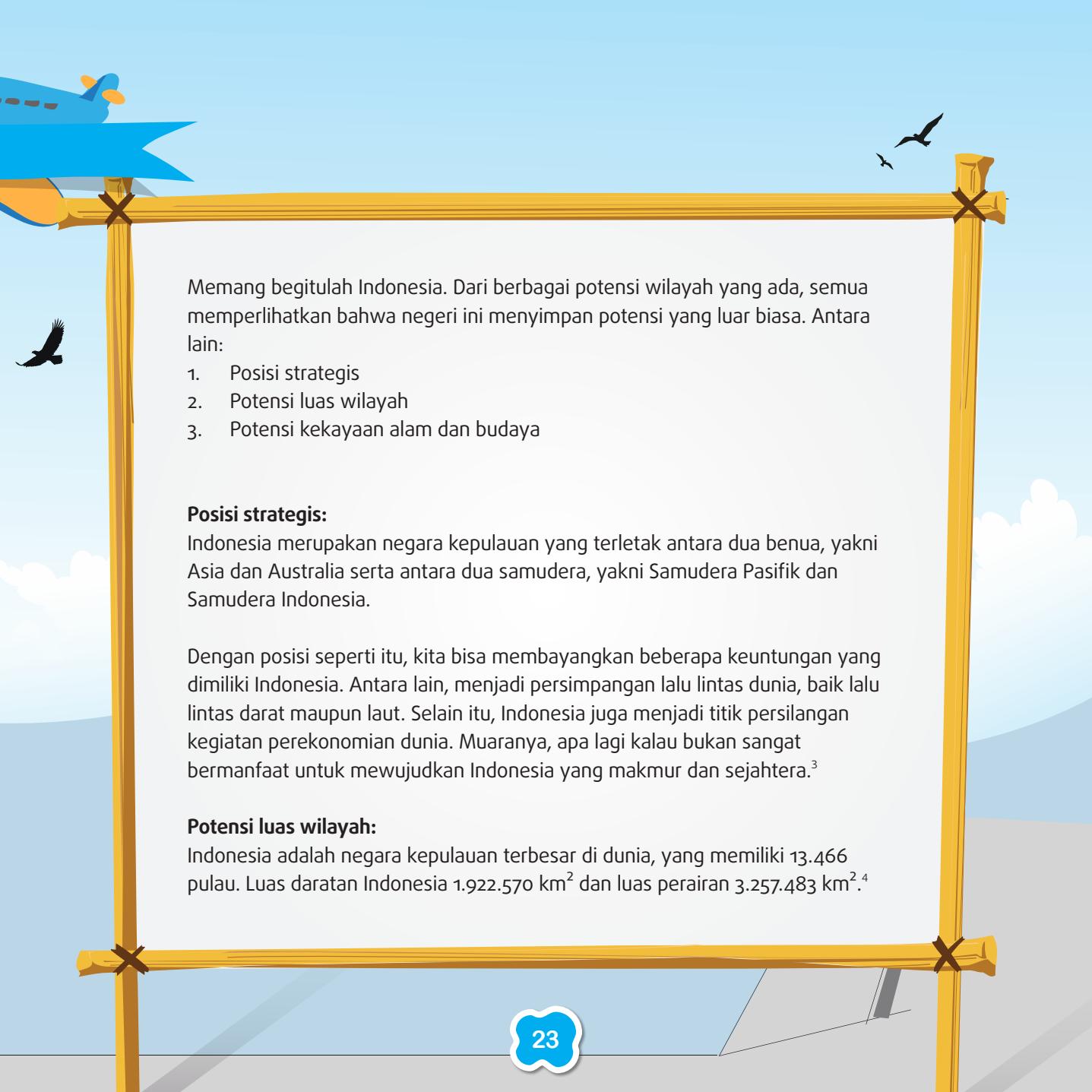


Bayangkan jika kesehatan semua
penduduk Indonesia terjamin...



Potensi Wilayah

Bericara tentang besarnya potensi wilayah yang dimiliki Indonesia, tentu tak ada yang menyangkal. Indonesia, harus diakui merupakan negeri yang memiliki kekayaan alam berlimpah, posisi yang strategis, dan bahkan kesuburan yang luar biasa. Saking suburnya, sampai-sampai grup musik legendaris Koes Ploes, pada 1973 menyebut, "tongkat kayu dan batu dan batu jadi tanaman."



Memang begitulah Indonesia. Dari berbagai potensi wilayah yang ada, semua memperlihatkan bahwa negeri ini menyimpan potensi yang luar biasa. Antara lain:

1. Posisi strategis
2. Potensi luas wilayah
3. Potensi kekayaan alam dan budaya

Posisi strategis:

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak antara dua benua, yakni Asia dan Australia serta antara dua samudera, yakni Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia.

Dengan posisi seperti itu, kita bisa membayangkan beberapa keuntungan yang dimiliki Indonesia. Antara lain, menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas darat maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Muaranya, apa lagi kalau bukan sangat bermanfaat untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera.³

Potensi luas wilayah:

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 13.466 pulau. Luas daratan Indonesia $1.922.570 \text{ km}^2$ dan luas perairan $3.257.483 \text{ km}^2$.⁴

Apa yang dapat dimanfaatkan dengan wilayah seluas itu? Pusatkan pikiran Anda untuk membayangkan betapa setiap pulau dan laut Indonesia memiliki kekayaan alam yang tak ternilai. Mulai yang tampak, seperti flora dan fauna, hingga yang tidak terlihat, seperti bahan tambang.

Jika semua kekayaan tersebut dimanfaatkan secara optimal, tentu bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera, sebagaimana negeri impian.

Potensi kekayaan alam dan budaya:

Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terlengkap di dunia. Diperkirakan, sekitar 100-150 genus dari tumbuhan *monoecious* dan *diecious*, dengan 25.000-30.000 spesies terdapat di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia disebut pula sebagai negara “mega biodiversity” atau “megadiversity”.

Sementara, jenis hewan yang ada juga lengkap, sekitar 220 ribu jenis. Terdiri atas sekitar 200 ribu serangga, 4 ribu jenis ikan, 2 ribu jenis burung, serta seribu jenis reptil dan amphi. Bahkan, 17% jenis serangga di dunia, bisa ditemukan di Indonesia.⁵

Jadi, betapa besar potensi yang dimiliki Indonesia. Bahkan, total potensi maritim Indonesia, diperkirakan mencapai enam kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya, sekitar Rp7.200 triliun per tahun.⁶

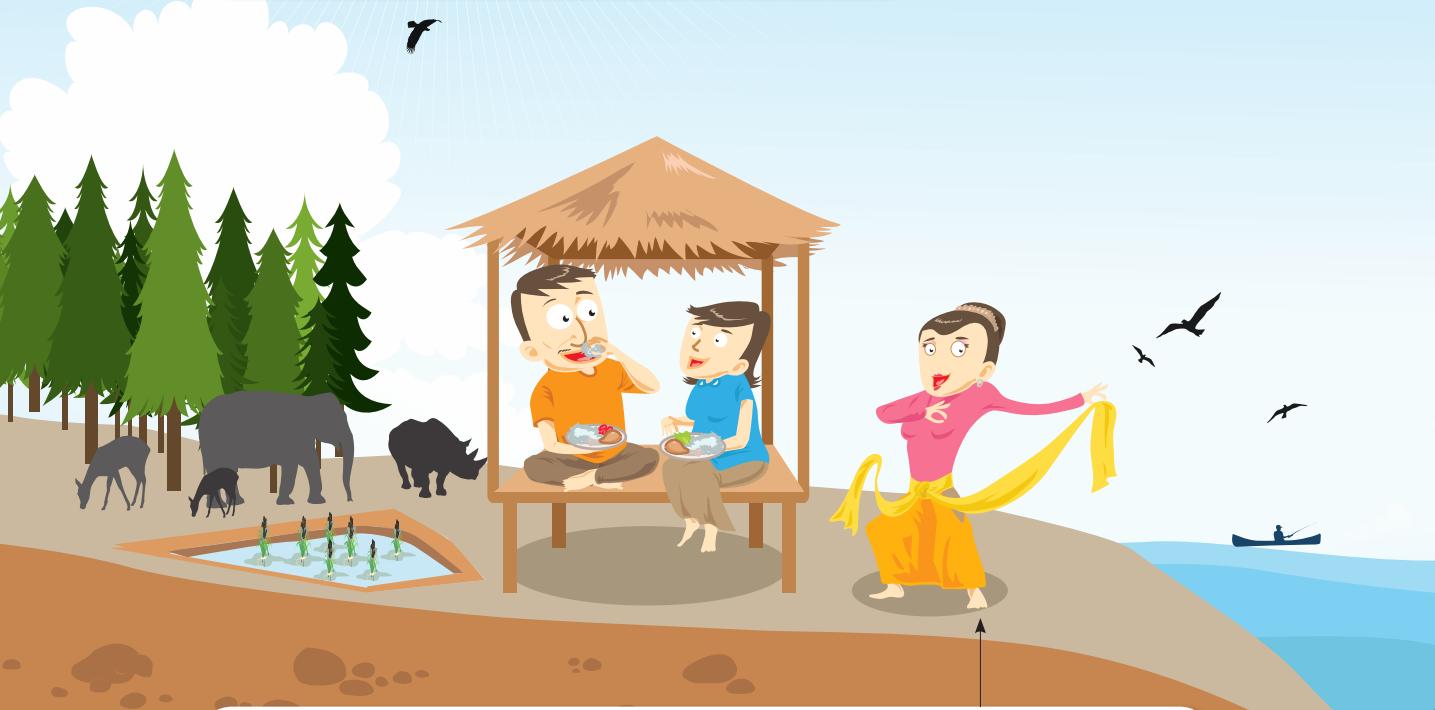
Itu baru potensi laut. Belum lagi potensi kehutanan, yang pernah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di negeri ini setelah minyak dan gas bumi. Demikian juga dengan tambang, minyak, perkebunan, dan lain-lain.



Bayangkan, jika potensi laut yang diperkirakan mencapai Rp7.200 triliun per tahun dimanfaatkan sebaik mungkin, misalnya tak hanya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, juga untuk ekspor, betapa banyak devisa yang masuk.

Bayangkan pula, jika semua dimanfaatkan secara optimal, tentu kondisi sebagaimana dimiliki negeri impian pun bukan lagi mimpi bagi negeri ini.

Keanekaragaman Budaya dan Kekayaan Alam

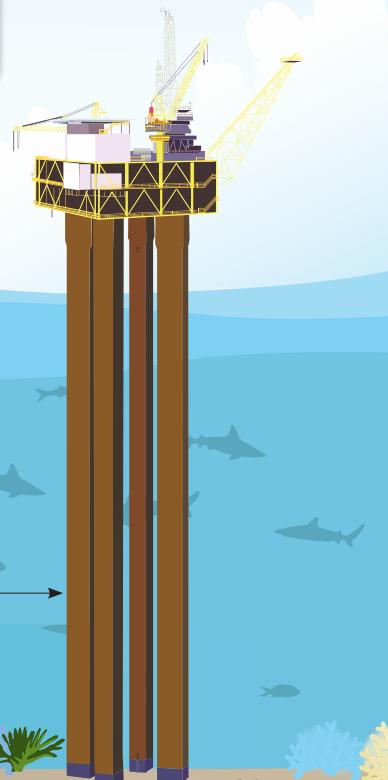


Memiliki tingkat keanekaragaman budaya dan bahasa daerah yang sangat tinggi. Setidaknya, Indonesia memiliki lebih dari 746 bahasa daerah. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan dibanding negara lainnya, karena memiliki potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi.⁷ Misalnya, budaya munggar di Sunda ketika hendak menjalankan ibadah puasa, toron di Madura ketika pulang kampung, dan sebagainya.

Memiliki sekitar 220 ribu jenis hewan. Di antaranya adalah 2.000 jenis burung, 220.000 jenis serangga, 4.000 jenis ikan, 1.000 jenis reptilia, dan sebagainya.⁵ Satwa langka komodo, yang diyakini merupakan peninggalan era purbakala, juga hanya bisa ditemui di Indonesia. Begitu pula orang utan, anoa, jalak bali, semua merupakan satwa khas negeri ini.



Merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan bobot produksi sekitar 87,1 juta ton. Jumlah yang fantastik tersebut meliputi 4,4 juta ton di wilayah tangkap perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton lainnya berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁸ Ikan tuna dan cakalang yang begitu diminati pasar, misalnya, banyak ditemui di perairan Indonesia.



Menduduki peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu 4,3 miliar barrel. Sedangkan untuk gas alam, peringkat ke-8 dengan produksi 7.2 trillion cubic feet (tcf). Begitu pula dengan kekayaan tambang lain, secara umum menduduki peringkat keenam terkaya di dunia. Antara lain, memiliki 2,3% cadangan emas dunia, peringkat kedua produksi timah yang setara dengan 26% produksi timah dunia. Sedangkan produksi tembaga yang mencapai 10,4% produksi dunia, merupakan produksi terbesar kedua di dunia. Nikel menduduki peringkat keempat di dunia, dengan produksi 8,6% produksi dunia.⁹

Sejarah besar

Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, diakui sebagai salah satu titik penting sejarah bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan, bangsa ini bisa leluasa mengurus diri sendiri, mengelola kekayaan yang dimiliki, dan memanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran bangsa.

Begitupun, sejarah panjang Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Bahkan, bukan hanya ketika Indonesia berada dalam penjajahan Belanda selama 3,5 abad dan Jepang 3,5 tahun.

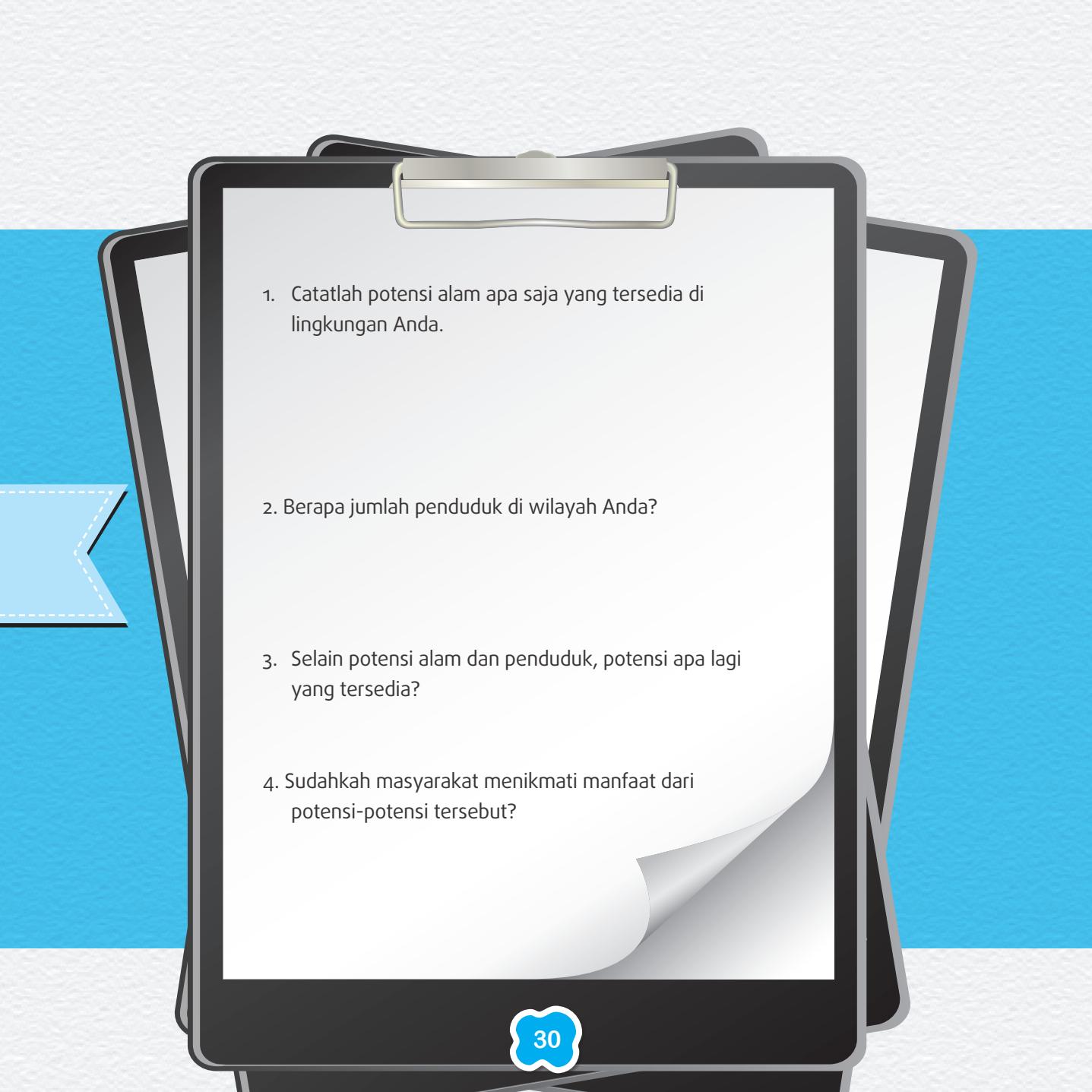


Merdeka..!

Lebih dari itu, ketika garis historis ditarik ke belakang, tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari negeri ini.

Walhasil, kemampuan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara, Sriwijaya yang begitu digdaya, Samudera Pasai yang menguasai perdagangan, bahkan mozaik-mozaik berupa penelitian jejak peradaban seperti benua Atlantis dan situs Gunung Padang, kian mengokohkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah besar Indonesia.

Bisa dibayangkan, betapa besar sesungguhnya bangsa ini!

- 
1. Catatlah potensi alam apa saja yang tersedia di lingkungan Anda.
 2. Berapa jumlah penduduk di wilayah Anda?
 3. Selain potensi alam dan penduduk, potensi apa lagi yang tersedia?
 4. Sudahkah masyarakat menikmati manfaat dari potensi-potensi tersebut?

- 
5. Setelah mengerti tentang berbagai potensi yang terkandung di wilayah Anda, bayangkan betapa besar manfaat yang akan diterima rakyat jika seluruh potensi itu dimanfaatkan. Ekspresikan ke dalam bentuk tulisan/gambar/puisi!



@KPK_RI #SIAPberAksi

Bagaimana kondisi negara dan
masyarakat Indonesia sekarang?

INDONESIA (BELUM) MAKMUR & SEJAHTERA





APA
BUKTI
INDONESIA
BELUM
MAKMUR
DAN
SEJAHTERA?

Kondisi Indonesia

Angka pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data Februari 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92% atau berdasarkan angka absout mencapai 7,170,523 jiwa.¹⁴ Dibandingkan negara maju, angka ini jauh lebih tinggi. Misal Belanda 3,3% atau Denmark 3,7%. Bahkan, dibandingkan negara tetangga, Indonesia juga termasuk tinggi. Misal, Kamboja yang hanya 3,5% pada tahun 2007, Thailand 2,1% pada 2009.¹⁵

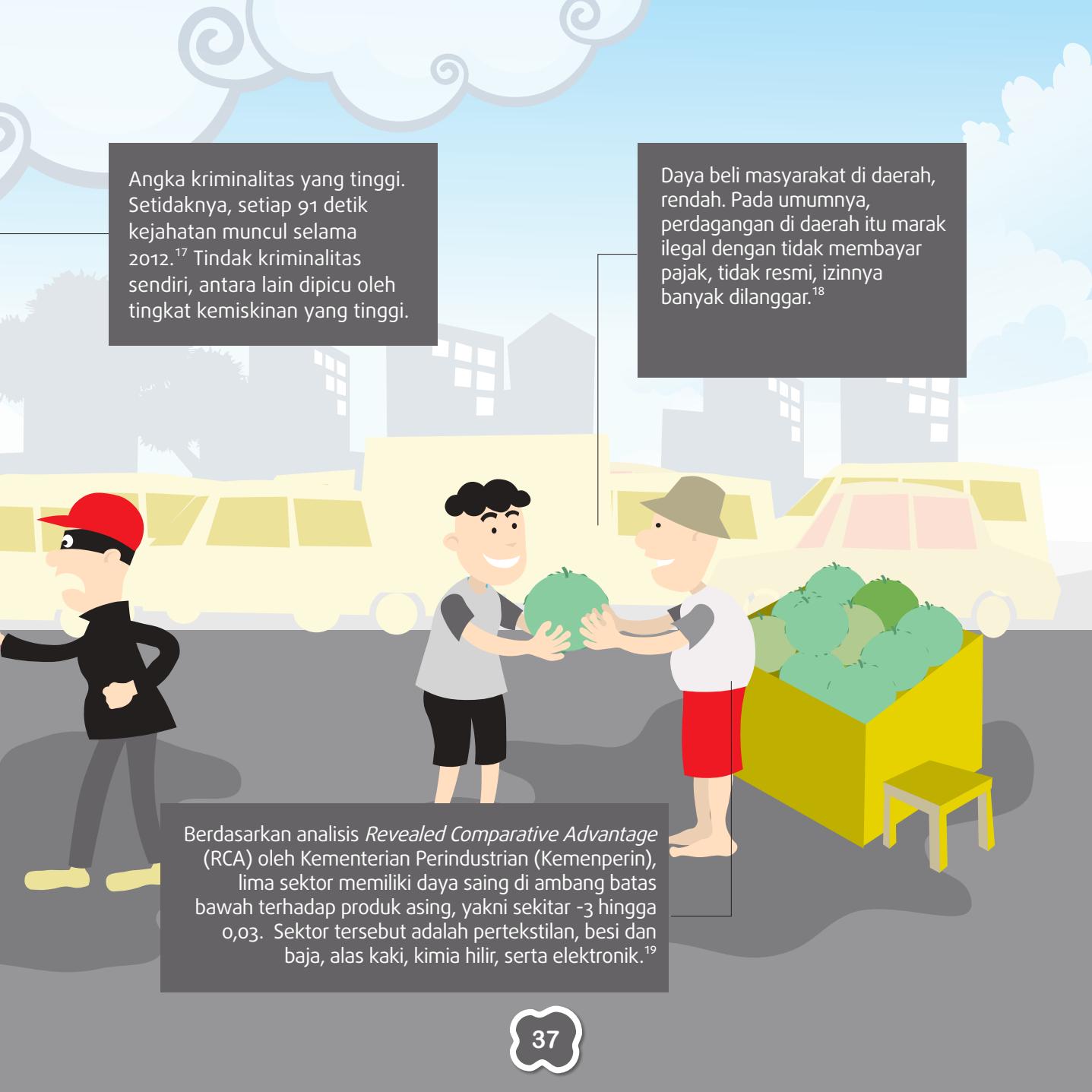
Tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi. Saat ini, rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD).¹² Relevan dengan kondisi tersebut, angka putus sekolah pun menjadi tinggi. Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹³



Angka mortalitas ibu hamil dan melahirkan pada 2012, ternyata masih tinggi, yakni 359 per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat tajam dibanding 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara.¹⁶



Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD4,000.¹⁰ Bandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia jauh tertinggal. Pada 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD80,288, Qatar 43,100, dan Belanda USD38,618.¹¹



Angka kriminalitas yang tinggi. Setidaknya, setiap 91 detik kejahatan muncul selama 2012.¹⁷ Tindak kriminalitas sendiri, antara lain dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi.

Daya beli masyarakat di daerah, rendah. Pada umumnya, perdagangan di daerah itu marak ilegal dengan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnya banyak dilanggar.¹⁸

Berdasarkan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), lima sektor memiliki daya saing di ambang batas bawah terhadap produk asing, yakni sekitar -3 hingga 0,03. Sektor tersebut adalah pertekstilan, besi dan baja, alas kaki, kimia hilir, serta elektronik.¹⁹



Jadi, Indonesia adalah negara kaya yang (belum) makmur dan sejahtera!



Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Beginilah Indonesia yang sangat kita cintai. Negeri ini memiliki sumber kekayaan alam berlimpah dan juga berbagai potensi yang luar biasa. Namun, di sisi lain, negeri ini ternyata belum juga bisa keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi. Dengan kata lain, kita seakan-akan hidup di tengah lautan paradoks: subur tak juga makmur, kaya tak kunjung sejahtera.



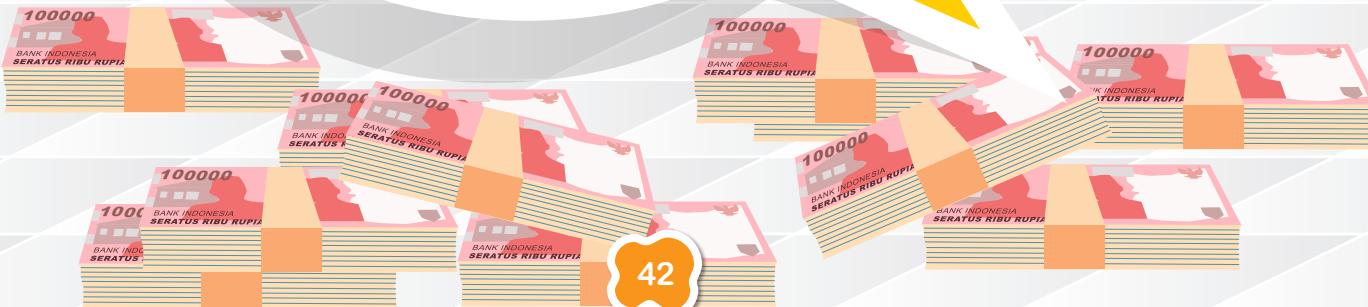
Mengapa?

KORUPSI, SALAH SATU PENYEBABNYA!





TIDAK
PERCAYA ?



**Bayangkan seandainya Anda
memiliki uang Rp168 TRILIUN ...**

Bayangkan, berapa gedung sekolah dasar (SD) baru dapat dibangun?

Asumsi biaya pembangunan ruang kelas baru seluas 64 m^2 adalah Rp101.632.000. Jika sebuah gedung sekolah baru memiliki enam kelas, maka total biaya pembangunan kelas baru sebesar Rp609.792.000.²⁰

Jika gedung baru tersebut dilengkapi dengan satu ruang guru seluas 64 m^2 , satu ruang tata usaha seluas 32 m^2 , satu ruang kepala sekolah seluas 32 m^2 , empat kamar mandi dengan total luas 32 m^2 , maka total biaya yang diperlukan sebesar Rp873.872.000.

Dengan demikian, uang sebesar Rp168 triliun tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sekitar 195 gedung baru.

Jumlah itu bisa lebih besar, jika uang sebanyak itu dipergunakan tidak untuk membangun sekolah baru, tetapi untuk perbaikannya.

SEKOLAH



Bayangkan, berapa anak terlantar bisa disekolahkan hingga bangku SMA?

Di Indonesia, biaya pendidikan bukan alang-kepalang tinggi. Tak heran, dibarengi taraf hidup yang jauh dari harapan, banyak anak-anak putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan yang layak.

Maka, seandainya uang sebesar Rp168 triliun tersebut dipergunakan untuk membiayai anak-anak tidak mampu dan putus sekolah, berapa anak yang bisa diselamatkan pendidikannya?

Dengan asumsi bahwa biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi mencapai Rp50 juta (besarnya tergantung jenis sekolah), maka jumlah anak yang bisa disekolahkan hingga lulus perguruan tinggi sebanyak 3,36 juta anak.



Bayangkan, berapa penduduk miskin bisa diberi modal untuk berwirausaha?

Dari hasil survei pedagang makanan di Jakarta, rata-rata modal yang mereka butuhkan maksimal Rp5 juta. Modal terbesar diperlukan untuk pembuatan gerobak dan perlengkapannya, yang mencapai Rp3,5 juta. Sedangkan untuk modal lancar, seorang pedagang bakso yang "menghabiskan" 5 kg daging, adalah Rp600 ribu per hari.

Untuk pedagang yang mempergunakan gerobak pikul, biaya yang dibutuhkan bahkan lebih kecil lagi, yakni sekitar Rp2 juta untuk pembuatan gerobak pikul dan perlengkapannya.

Belum lagi untuk modal lancar, pedagang somay rata-rata membutuhkan modal harian sebesar Rp400 ribu, pedagang gorengan Rp300 ribu rupiah.

Dengan asumsi modal termahal, yakni Rp5 juta per orang, maka uang sebesar Rp168 triliun bisa dipergunakan untuk memberi modal kepada 33,6 juta kepala keluarga. Luar biasa, bukan?



Bayangkan, berapa kilometer jalan rusak bisa diperbaiki?

Banyak sekali jalan rusak di negeri ini. Pada September 2013, tercatat 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Lantas, berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki? Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa kebutuhan dana untuk jalan daerah mencapai Rp118,073 triliun.²¹

Dengan demikian, jika uang Rp168 triliun itu dimanfaatkan, tentu semua jalan rusak bisa diperbaiki.



Bayangkan pula, berapa desa yang bisa dialiri listrik?

Ini tak lepas dari fakta mencengangkan berikut. Di era serba listrik seperti sekarang, ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap-gulita. Jumlah tersebut, setara dengan 13% desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012.²²

Pemasangan infrastruktur baru, tentu bukan satu-satunya. Di daerah yang listriknya kerap padam pun, uang sebanyak itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pasokan solar dan pemeliharaan infrastruktur.

Dengan uang Rp168 triliun juga, berapa banyak daerah yang listriknya kerap padam karena kurangnya pasokan solar, bisa dinormalkan kembali?

Dan, tentu saja, bukan hanya listrik. Masih banyak yang lain, yang akan sangat terbantu dengan uang sebanyak itu. Maka, bayangkan pula, berapa banyak nyawa bayi terselamatkan, berapa banyak bisa menciptakan sumur-sumur dan sungai-sungai baru agar tidak lagi terjadi banjir, berapa banyak pula mendukung transportasi massal demi mengurangi kemacetan.

Dan, mari bayangkan, bayangkan semua itu... Bayangkan pula fenomena lain yang ada.

Sungguh, Rp168 triliun sangat berarti, bukan?

Tahukah Anda? **Rp168 TRILIUN...**

Merupakan estimasi total biaya eksplisit praktik korupsi sepanjang 2001-2012

Dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Uang itulah yang dinikmati para koruptor, yang disebut **biaya eksplisit**. Sepanjang 2001-2012, biaya eksplisit akibat ulah 1.842 koruptor yang diajukan ke meja hijau, adalah sebesar itu tadi. Besarnya itu tadi, Rp168 triliun.²³

Yang lebih mencengangkan (baca: memprihatinkan), **biaya eksplisit** bukanlah satu-satunya kerugian akibat ulah koruptor. Karena selain itu terdapat yang disebut biaya antisipasi korupsi, biaya akibat reaksi terhadap korupsi, dan biaya implisit korupsi. **Biaya antisipasi** merupakan biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten. Juga, biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Sedangkan **biaya akibat reaksi** terhadap korupsi, antara lain adalah: biaya peradilan (hakim, jaksa, dan sebagainya); biaya penyidikan, biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri.

Adapun **Biaya implisit** merupakan biaya oportunitas korupsi, termasuk di antaranya, beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya. Selain itu, juga merupakan perbedaan ekonomi berantai, antara kondisi terdapat korupsi dan tidak ada korupsi.

Jadi, memang luar biasa kerugian akibat korupsi. Terlebih, biaya eksplisit ternyata merupakan komponen terkecil dari biaya sosial yang diakibatkan korupsi.



Jelaslah sudah, betapa menderita rakyat akibat korupsi. Karena korupsi, kemakmuran seakan-akan hanya utopia, yang entah kapan bisa diraih. Karena korupsi, negeri yang kaya-raya ini, pun masih harus tertatih-tatih secara sosial-ekonomi.

Mengapa bisa begitu? Ya, karena dari biaya eksplisit yang ada, ternyata tidak seluruhnya ditanggung oleh koruptor. Fakta yang ada, hakim hampir selalu memutuskan hukuman lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa, baik dilihat dari hukuman fisik maupun denda untuk mengganti kerugian negara yang ada.

Sepanjang 2001-2012, ternyata putusan hakim hanya mewajibkan koruptor membayar sebanyak Rp15 triliun.

Siapa yang menanggung sisanya?

Rp168 triliun – Rp15 triliun = Rp 153 triliun

Ternyata rakyat!

Rakyatlah yang menanggung! Anda, saya, kita semua turut menanggung kerugian negara tersebut.

Apakah Anda rela?

1. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh korupsi terhadap belum makmurnya Indonesia?

-  Tidak ada pengaruhnya
-  Sedikit pengaruhnya
-  Besar pengaruhnya

2. Jika ada pengaruhnya? Tuliskan...

- 
3. Ekspresikan sikap dan perasaan Anda terhadap kerugian yang diakibatkan oleh koruptor melalui puisi/gambar/tulisan.



@KPK_RI #SIAPberAksi

Apakah Korupsi Itu?



Definisi Korupsi:

Berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus*. Asal kata *Corruptio* adalah *corrumpere*, kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah, turun ke Bahasa Indonesia yaitu *korupsi*. (Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi*)

Korupsi : kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian
(*The Lexicon Webster Dictionary*, 1978)

Penyebab Korupsi:

Menurut GONE Theory, faktor-faktor penyebab korupsi meliputi :

1. *Greeds* (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *Opportunities* (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs* (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. *Exposures* (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Dampak Korupsi, antara lain:

1. Bidang Pendidikan: biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyak sekolah rusak, dll.
2. Bidang kesehatan: biaya kesehatan tinggi, angka kematian ibu hamil dan menyusui tinggi, tingkat kesehatan yang buruk, dll.
3. Bidang ekonomi: harga-harga melambung, ekonomi biaya tinggi, persaingan pasar yang tidak sehat, dll.
4. Bidang sosial: angka pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, kriminalitas tinggi, kesenjangan antara kaya dan miskin tinggi, dll.
5. Bidang pelayanan publik: tersendatnya pelayanan publik, sulitnya proses perizinan, menurunkan daya tarik investor, dll.
6. Bidang lingkungan: banjir dan bencana alam, penggundulan hutan yang masif, mempercepat laju pemanasan global, dll



Benarkah terdapat korelasi antara peran korupsi dan kesejahteraan?

Apakah benar suatu negara bisa lebih makmur melalui pemberantasan korupsi?



Jika demikian, mengapa kita semua tidak segera berkontribusi memberantas korupsi?

Pemberantasan korupsi adalah pilihan penting dalam rangka menjadikan negara sejahtera!

Bagaimana Cara
Memberantas Korupsi?

1001 CARA BERANTAS KORUPSI





Tidak ada cara lain, korupsi harus diberantas. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Imbasnya, apa lagi kalau bukan membuat negeri kita yang kaya raya itu masih belum juga bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Segala potensi yang dimiliki pun seakan tidak berarti. Layanan publik masih buruk, tingkat kesehatan rendah, pendidikan yang tidak terjamin, tingkat pendapat masyarakat yang masih memprihatinkan, dan banyak lagi indikator negara makmur yang belum bisa dicapai. Dengan kata lain, harapan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana negeri impian pun, bak jauh panggang dari api.

Maka itu tadi, korupsi memang harus dimusnahkan. Bagaimana caranya?

Strategi Pemberantasan Korupsi

1. Represif

2. Perbaikan Sistem

3. Edukasi dan Kampanye



Agar berjalan lebih efektif, ketiganya harus dilakukan bersamaan.

Represif

Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang dilakukan:



1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat

Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap, berkat adanya pengaduan masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengaduan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan.

2. Penyelidikan

Kegiatan yang dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti*. Jika tidak diketemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik menghentikan penyelidikan.

Dalam hal perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaaan. Jika penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaaan, kepolisian atau kejaksaaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.

* termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.



3. Penyidikan

Tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanda izin Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan juga membebaskan penyidik KPK untuk terlebih dahulu memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara yang oleh undang-undang, tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih dahulu.

Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Artinya sekali KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka proses harus berjalan terus hingga ke penuntutan.

4. Penuntutan

Kegiatan penuntutan dilakukan penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 hari.

Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpakkannya ke pengadilan, kewenangan penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menangani.

100%
VONIS BERSALAH



5. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)

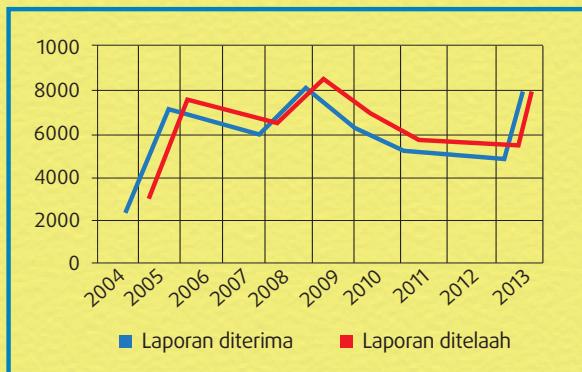
Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.

Istilah Hukum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

1. Saksi: Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
2. Tersangka: Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Terdakwa: Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
4. Terpidana: Seseorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Banding: Upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa atau terdakwa jika putusan pengadilan tingkat pertama pada pengadilan negeri dirasakan kurang memuaskan.
6. Kasasi: Upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa atau terdakwa jika putusan terakhir oleh pengadilan lain selain MA dirasakan kurang memuaskan.
7. Inkrah: Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Peninjauan Kembali: Upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

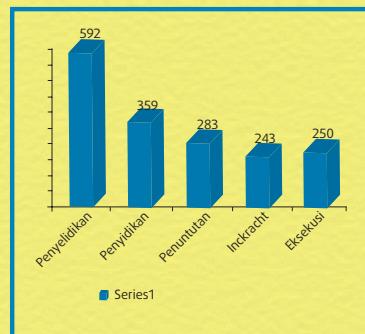
Kinerja KPK dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Pengaduan Masyarakat 2004-2013²⁴



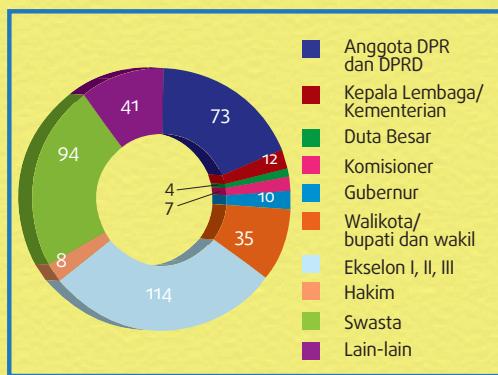
(per 31 Oktober 2012)

Penanganan Korupsi oleh KPK
Tahun 2004-2013²⁵



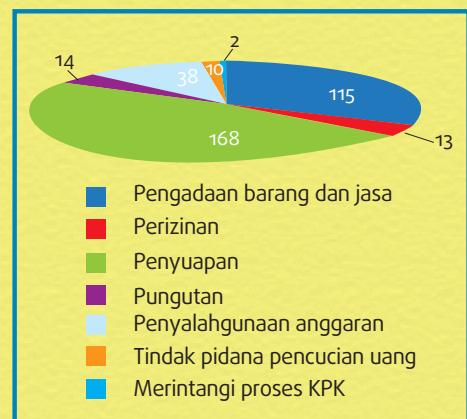
(per 31 Desember 2013)

Siapa Pelaku Korupsi?²⁶



Berdasarkan kasus yang ditangani KPK 2004-2013
(per 31 Desember 2013)

Penanganan Korupsi (oleh KPK)
Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2013²⁷



Untuk info lebih lengkap dan terkini, silakan mengakses <http://acch.kpk.go.id>

Perbaikan Sistem

Tak dimungkiri, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan, dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak. Tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.

Tentu saja harus dilakukan perbaikan. Karena sistem yang baik, bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba *online*, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya.

KPK pun sudah banyak melakukan upaya perbaikan sistem. Dari berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah), serta mendorong transparansi penyelenggara negara (PN).

Sementara, guna mendorong transparansi penyelenggara negara (PN), KPK menerima pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Untuk LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi atau pegawai negeri bersangkutan dianggap menerima suap.



Beberapa upaya pencegahan melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang Dilakukan KPK bekerjasama dengan BPKP

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun dalam pelaksanaan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Bidang kegiatan korsupgah yang dilakukan KPK antara lain Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik di RSUD, Pelayanan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor, dan Pelayanan Publik di PTSP.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kemudian KPK mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan APBD atas program ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan serta mengidentifikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Risiko pada unit kerja. Selanjutnya, KPK menyusun rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan potensi tindak pidana korupsi dan tingkat korupsi.



Beberapa Kajian, Pengembangan, dan Penelitian KPK

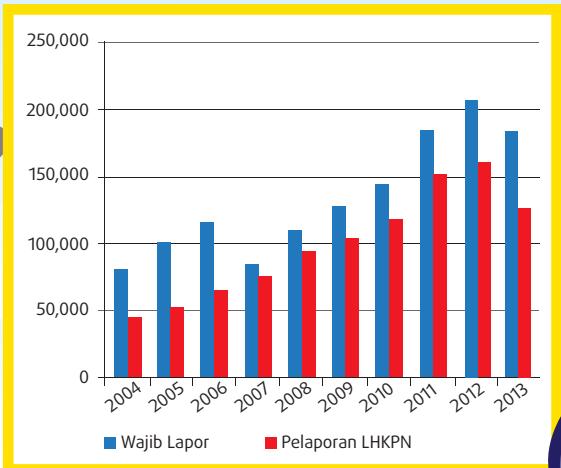
No.	Kajian	Pengembangan	Penelitian
01	Kajian Penggunaan APBD untuk klub sepak bola	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	Survey Integritas
02	Kajian Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) di Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Ibadah Haji	Survey Penilaian Antikorupsi
03	Kajian Sistem Administrasi Layanan Kepolisian	Pelayanan Perpjakan	Survey Persepsi Masyarakat
04	Kajian Penggunaan Batubara di Indonesia	Perencanaan dan Pengelolaan Hutan	Penilaian Inisiatif Antikorupsi

Hasil kajian, antara lain belum ditetapkannya wilayah pertambangan, tidak dilaksanakannya kewajiban pemegang IUP kepada pemerintah, tidak optimalnya kegiatan pengawasan dan tidak terlaksananya kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan baik. Keempat permasalahan tersebut jika dibiarkan akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian keuangan negara serta menjadi celah bagi terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

Hasil kajian: Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengelola dana bantuan sosial secara transparan dan akuntabel.



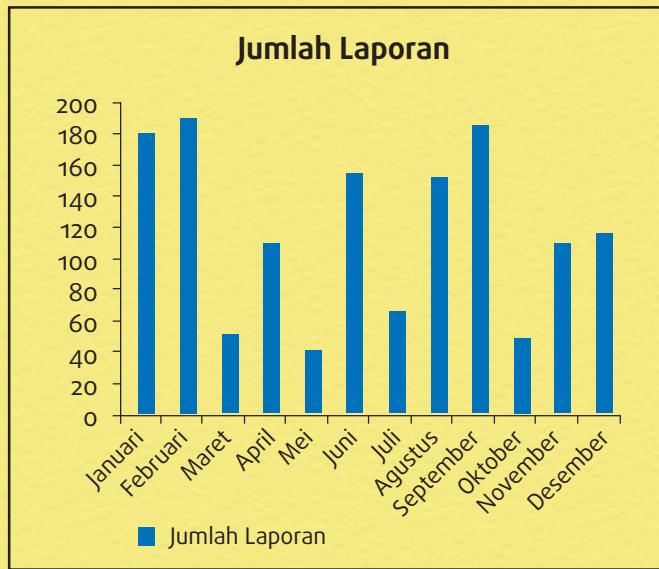
Jumlah Penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara 2004-2013



Untuk mengetahui profil kekayaan pejabat negara,
silakan mengakses <http://acch.kpk.go.id>



Jumlah Laporan Gratifikasi 2013²⁹



Edukasi dan Kampanye

Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah.

Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudah, adalah pandangan mengenai pemberian "uang terima kasih" kepada aparat pelayan publik, yang dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap korupsi. Hanya karena merasa "tidak kenal" si pelaku, atau karena merasa "hanya masyarakat biasa," banyak yang menganggap dirinya tidak memiliki kewajiban moral untuk turut berperan serta.

Itulah sebabnya, edukasi dan kampanye penting dilakukan. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar.

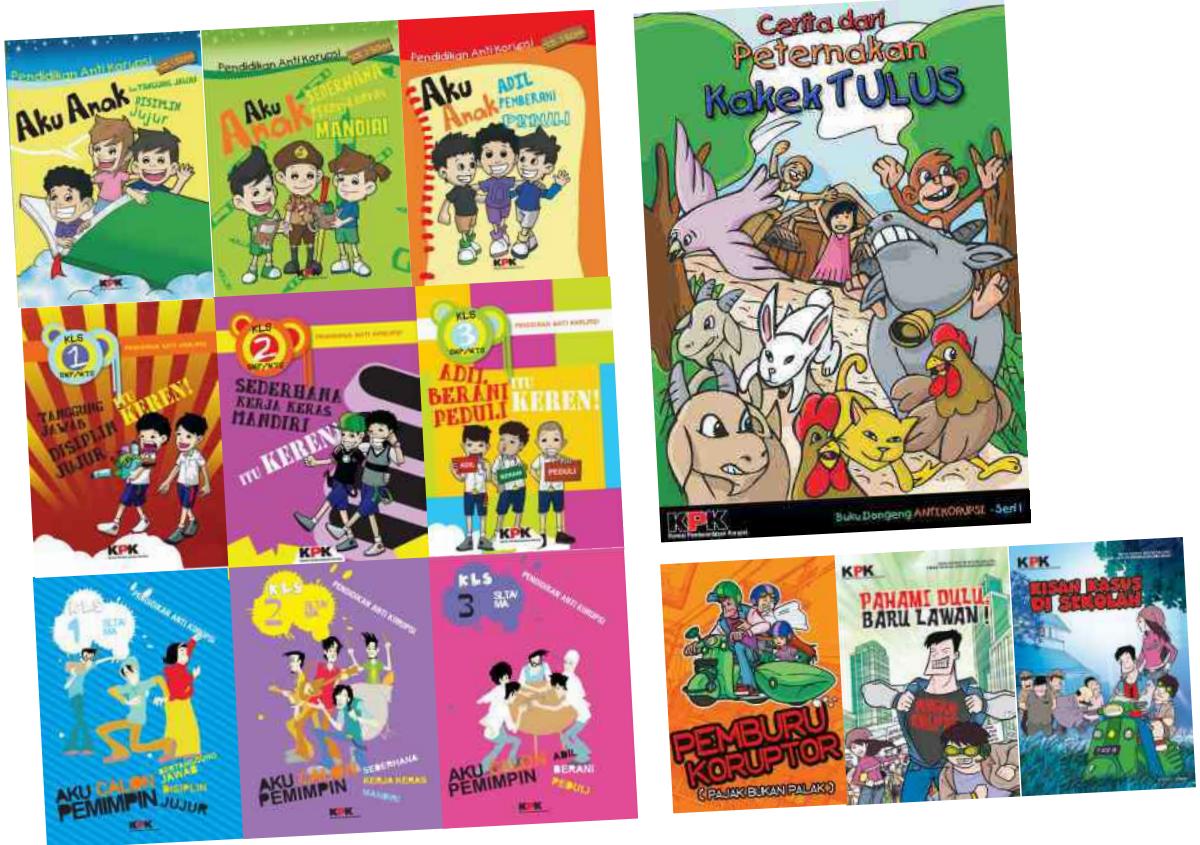
Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap, pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi antikorupsi.

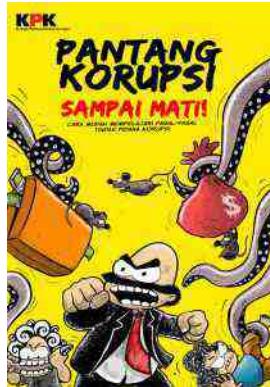
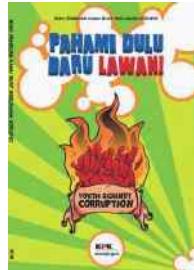






Dalam upaya membangkitkan **KESADARAN MASYARAKAT**
untuk peduli dengan **BAHAYA KORUPSI**
sekaligus mengajak untuk turut
BERPARTISIPASI dalam **PEMBERANTASAN KORUPSI**,
KPK berkampanye menyampaikan
PESAN-PESAN ANTIKORUPSI
melalui berbagai media komunikasi.





Upaya KPK agar masyarakat memiliki
PERILAKU DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
dilakukan dengan cara membekali masyarakat dengan
PENGETAHUAN tentang **PEMBERANTASAN KORUPSI**.
Untuk itu, KPK menerbitkan berbagai **MEDIA PEMBELAJARAN**
yang dapat digunakan masyarakat sebagai panduan.





PENCEGAHAN KORUPSI harus dilakukan sejak dini agar terbentuk **GENERASI PELURUS BERINTEGRITAS**.

Tak heran jika KPK sangat serius melakukan

PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI SEJAK DINI

kepada pelajar dari jenjang **PAUD/TK hingga SMA**.

Selain menerbitkan buku dan permainan, KPK juga melakukan beragam aktivitas yang ditujukan kepada pelajar.





Selain anak dan pelajar, KPK juga tak lupa melakukan
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
yang ditujukan untuk **MAHASISWA, PNS, dan PEREMPUAN**.
Alasannya karena mereka berperan penting dalam
PEMBERANTASAN KORUPSI.
Mahasiswa adalah **AGEN PERUBAHAN**, perempuan adalah **TIANG NEGARA**, dan PNS adalah **PELAYAN MASYARAKAT**.





KPK sepenuhnya menyadari bahwa
DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
dalam **PEMBERANTASAN KORUPSI**
merupakan salah satu faktor penting keberhasilan.
Dalam setiap kesempatan menyelenggarakan
EVENT KAMPANYE ANTIKORUPSI,
KPK selalu mengajak partisipasi masyarakat.
Dan masyarakat pun menunjukkan dukungannya
kepada pemberantasan korupsi dengan berbagai **AKSI KREATIF**.

Apa yang bisa dilakukan
masyarakat?



SAATNYA
BERAKSI!



Mudah dan Menyenangkan!

Jangan bayangkan memberantas korupsi selalu dilakukan dalam suasana menegangkan. Benar memang, bahwa harus dibarengi dengan keseriusan. Begitu pula dengan kesungguhan dan tekad kuat, tetapi harus melekat. Namun itu tadi, bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi bersama KPK, semua bisa dilakukan dengan mudah dan menyenangkan.

Mengapa mudah? Ya, karena pemberantasan korupsi pada dasarnya teramat sederhana. Semua dilakukan sesuai kapasitas anggota masyarakat dan menyangkut perilaku sehari-hari.

Selain itu juga menyenangkan. Sebab, selayaknya permainan yang di dalamnya berisi tantangan, begitu pula dengan pemberantasan korupsi. Ketika anggota publik terlibat edukasi dan kampanye, misalnya, selain senang ketika melakukan perannya, juga ditantang agar peran itu dimainkan dengan baik supaya hasil yang diharapkan menjadi optimal.

Tips Ber-AKSI Memberantas Korupsi

Pantang terlibat
tindak pidana
korupsi

Pilih
salah satu
peran

Berlatih untuk
berintegritas

Ajak yang lain
untuk melakukan
hal yang sama

Pantang terlibat pidana korupsi

Siapa yang ingin mendekam di bui hingga sisa usia? Siapa yang ingin keluarga tersiksa menanggung aib? Siapa pula yang ingin kelak di akhirat akan didera dalam kobaran api neraka?

Siapa? Bayangkanlah pada diri kita masing-masing, adakah yang ingin seperti itu?

Rasanya tak ada.

Maka, buat apa melakukan korupsi?

Melalui pemahaman sederhana seperti itu, sudah selayaknya kita semua pantang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Terlebih, jika sejak semua sudah bertekad untuk turut berkontribusi dan terlibat dalam pemberantasannya.

Lebih dari itu, jika semua orang memiliki pemahaman serupa, bisa dibayangkan, betapa luar biasa hasilnya. Andai 247 juta rakyat Indonesia memiliki persamaan persepsi, maka bersihlah negeri ini dari korupsi.

Bagaimana agar tidak terlibat pidana korupsi?

Kita harus memahami tindak pidana korupsi



Korupsi, No Way!



Memahami Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan melalui 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor), yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis tipikor.

1. Penyalahgunaan jabatan/kekuasaan yang merugikan keuangan negara

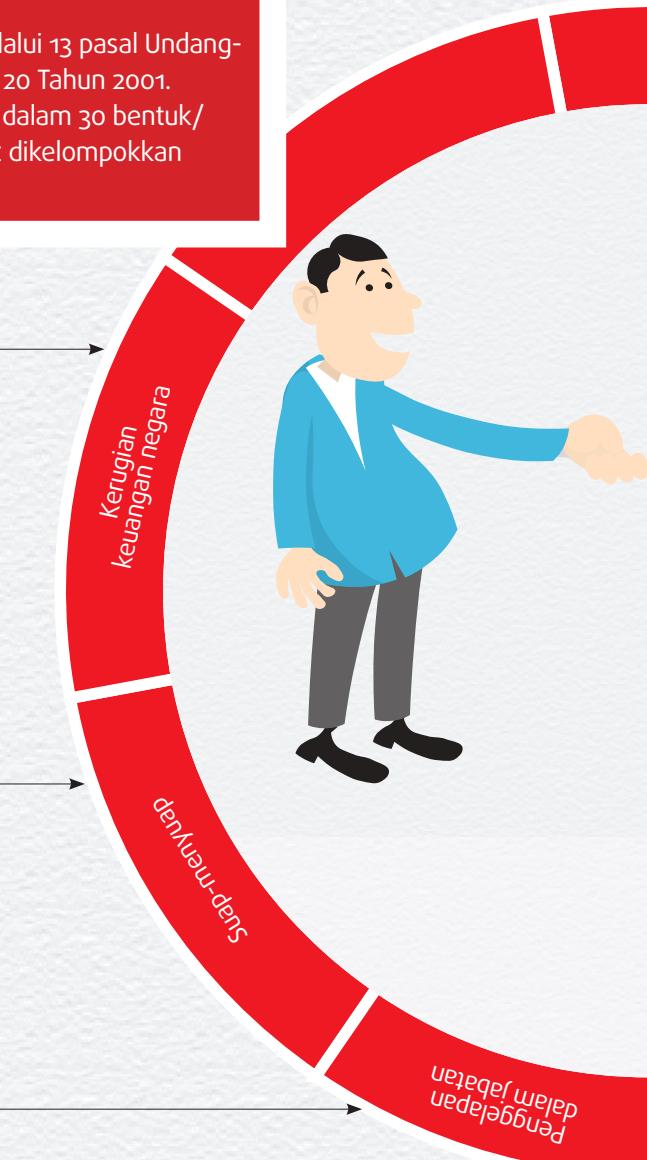
Perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Akibatnya, negara dirugikan.

2. Suap-menyuap

Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Aksi suap banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yang umum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis.

3. Penggelapan dalam jabatan

Korupsi seperti ini pelakunya tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain.





7. Gratifikasi

Siapa pun pegawai negeri yang disebabkan jabatan atau kewenangannya, lantas menerima berbagai hadiah serta fasilitas dari seseorang, dikategorikan sebagai korupsi. Hadiah atau fasilitas itu bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, atau biaya pengobatan.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Istilah bahasa Inggrisnya sering disebut *conflict of interest*. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.

5. Perbuatan Curang

Pemborong proyek, terkait kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong, tukang, atau toko bahan bangunan.

- Pengawas proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan.
- Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI/Polri.

4. Pemerasan

Di mana pun pemerasan menjadi perbuatan yang tidak tepui, sekaligus dikategorikan tindak pidana korupsi. Apabila seorang pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi.

- 
1. Dalam mengurus KTP, pernahkan Anda memberikan uang "terima kasih" kepada pengurus RT/RW, atau kelurahan? Menurut Anda, apakah perbuatan semacam itu termasuk gratifikasi/penuyapan atau tidak?
 2. Menurut Anda, apakah pemberong yang sedang mengerjakan gedung milik pemerintah misalnya, kemudian memalsukan nota pembelian dari toko bahan bangunan termasuk tindak pidana korupsi? Apakah pemberong tersebut bisa diajukan ke pengadilan?

- 
- A clipboard with a red arrow pointing right is positioned at the bottom right of the page. The clipboard has a black frame and a silver clip. A large white sheet of paper is attached to it, showing two questions.
3. Bagaimana pendapat Anda Jika pegawai negeri menerima kado ulang tahun dari rekanan pengusaha?
 4. Menurut Anda, apakah calon legislator yang mempergunakan mobil dinas untuk kampanye termasuk tindak pidana korupsi? Mengapa?

Pilih salah satu peran

Hidup adalah pilihan, begitu pula yang berlaku di masyarakat. Dan, begitu pula dengan pemberantasan korupsi. Bagi masyarakat, tersedia berbagai opsi peran yang bisa dimainkan.

Pemilihan peran dimungkinkan, karena KPK pun memiliki berbagai strategi dalam pemberantasan korupsi. Tidak melulu mempergunakan pola represif, KPK juga melakukan kajian sistem serta kampanye dan edukasi. Hal ini dimungkinkan, karena pemberantasan korupsi memang merupakan perpaduan upaya yang sinergis, antara penindakan dan pencegahan. Memang, media massa banyak memberitakan tentang upaya KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan dan penahanan, karena memang terlihat seksi bagi konsumsi publik. Namun, sejatinya itu tadi, seperti sudah dipaparkan pula, ternyata memang banyak hal lain dilakukan KPK, termasuk dalam sisi preventif.

Jadi, begitu pula dengan masyarakat yang bertekad bahu-membahu bersama KPK dalam pemberantasan korupsi. Bagi yang suka tantangan, tentu bisa berpartisipasi dalam strategi represif. Bagi yang memiliki gemar beranalisis, dapat melakukan melalui kajian sistem. Sedangkan yang senang dunia pendidikan, dapat melalui kampanye dan edukasi.

Apakah bisa publik berperan serta dalam setiap strategi sebagaimana dimiliki KPK tersebut? Tentu saja. Karena, masing-masing strategi memang memiliki wilayah kontribusi publik. Mari, gunakan kekuatan yang Anda miliki, apakah itu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, keterampilan, atau bahkan hobi Anda. Ya, apapun yang ada dalam diri Anda, bisa dimanfaatkan untuk turut memberantas korupsi.

Memilih peran apa?



1. Memilih peran dalam strategi represif

Hampir sebagian besar kasus yang terungkap di KPK, bermula dari pengaduan masyarakat. Bukan hanya kasus-kasus yang tidak menjadi sorotan publik, bahkan kasus besar pun tak sedikit yang bermula dari peran serta masyarakat itu.

Jika Anda memilih peran represif, melalui pengaduan seperti itulah antara lain bisa melakukan. Jika mendapati rekan kerja, atasan, atau bahkan rekanan melakukan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi, Anda bisa langsung melaporkan kepada KPK.

Jangan khawatir, karena identitas dan keamanan Anda akan sangat dilindungi. Anda pun tidak perlu datang langsung ke KPK. Cukup mengakses *website* KPK, www.kws.kpk.go.id, semua bisa dilakukan.

Hal terpenting adalah, Anda harus menyertakan bukti-bukti awal yang kuat. Jika hal itu Anda sertakan, maka proses akan berjalan lebih cepat.





Tidak hanya sebagai pelapor. Pada upaya lain, Anda juga bisa melakukan pengawasan internal aparat penegak hukum. Melalui pengawasan internal, maka dapat menangani potensi kerawanan/kelemahan pada suatu organisasi aparat birokrasi. Masyarakat juga dapat mendorong unit organisasi aparat penegak hukum untuk mencari solusi pemecahan masalah. Hal ini, antara lain dapat dilakukan melalui penyelenggaraan survey, seminar, lokakarya, serta pembahasan potensi masalah dalam suatu rubrik berkala.

Sudah banyak anggota masyarakat berkontribusi melalui strategi represif ini. Banyaknya kasus yang terungkap di KPK, adalah bukti tak terbantahkan, bahwa peran serta masyarakat memang sangat diperlukan. Jika Anda turut terlibat di dalamnya, maka akan semakin banyak kasus bisa dibongkar. Selain itu, banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi yang terlibat di dalam pemantauan peradilan, juga contoh bahwa publik pun bisa berperan serta.

Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Penerimaan Pengaduan

Pengaduan Masyarakat diterima di KPK melalui berbagai cara, yaitu dengan menerima pelapor langsung, melalui Surat, Faks, e-Mail, Telepon, SMS atau secara online melalui aplikasi KPK Whistleblower's System di website KPK.

Proses Verifikasi & Penelaahan

Semua Pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) apakah pengaduan tersebut dapat ditangani oleh KPK dan bagaimana penanganannya. Hasil verifikasi adalah berupa rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan. Setiap hari, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan KPK untuk mendapatkan persetujuan.

Apakah pengaduan tersebut mengenai tindak pidana korupsi?
Apakah ada bukti permulaan?

VERIFIED

Terkait fungsi lain

Penanganan cepat

Penanganan normal

Unit lain dalam KPK

Unit reaksi cepat

Proses penelaahan

Tindak Lanjut Penelaahan

Pengaduan telah ditangani
penegak hukum lain
dan bukan merupakan
kewenangan KPK

Unit Koordinasi
dan Supervisi

Dalam upaya pengayaan kasus, jika memerlukan bukti tambahan, tim dari Direktorat Dumas akan melakukan Kegiatan Klarifikasi ke lapangan yang bersifat terbuka maupun tertutup.



Bidang Penindakan

2. Memilih peran dalam strategi perbaikan sistem

Masyarakat juga bisa berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem. Melalui strategi ini, seorang anggota masyarakat bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memantau layanan publik
2. Melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik
3. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah
4. Membangun manajemen antikorupsi di lingkungan masing-masing

Banyak kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat terkait peran serta ini seperti lembaga-lembaga kajian antikorupsi di perguruan tinggi.

Dan, peluang untuk berkontribusi melalui peran ini pun sebenarnya sangat terbuka. Jika dipercaya menjadi pemimpin atau pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), misalnya, Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Anda bisa membangun manajemen antikorupsi. Bahkan, hal yang sama pun bisa dilakukan untuk organisasi lain di luar kampus.

Sangat mudah, bukan?



Pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara (PN) dapat pula berkontribusi. Caranya, dengan melaporkan LHKPN dan gratifikasi.

Terkait LHKPN, penyelenggara negara dapat menyampaikan LHKPN kepada KPK baik secara langsung maupun lewat pos. Customer service LHKPN akan memberikan bukti tanda terima terkait penyerahan LHKPN kepada Penyelenggara yang datang secara langsung, atau mengirimkan tanda terima tersebut lewat pos.

Sementara gratifikasi, selain langsung kepada KPK, PNS atau penyelenggara negara dapat pula melaporkan melalui unit pengendalian gratifikasi (UPG) yang berada di lingkungan kerja masing-masing.

- 
1. Amati layanan publik yang ada di sekitar Anda. Adakah prosedur dan sistem yang membuka kesempatan orang melakukan tindak pidana korupsi? Jika ada, buatlah usulan/saran agar kesempatan terjadinya korupsi semakin sempit!



@KPK_RI #SIAPberAksi

3. Memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye

Bakat apa yang Anda miliki? Menyanyi, mencipta lagu, puisi, atau di luar itu? Dalam edukasi dan kampanye, apapun bakat, kemampuan, dan kapasitas Anda, semua bisa dijadikan sebagai pintu awal. Jika Anda memiliki kemampuan mencipta lagu, bisa saja menciptakan lagu-lagu antikorupsi. Begitu pula jika berbakat menulis cerpen dan puisi, semua saja.

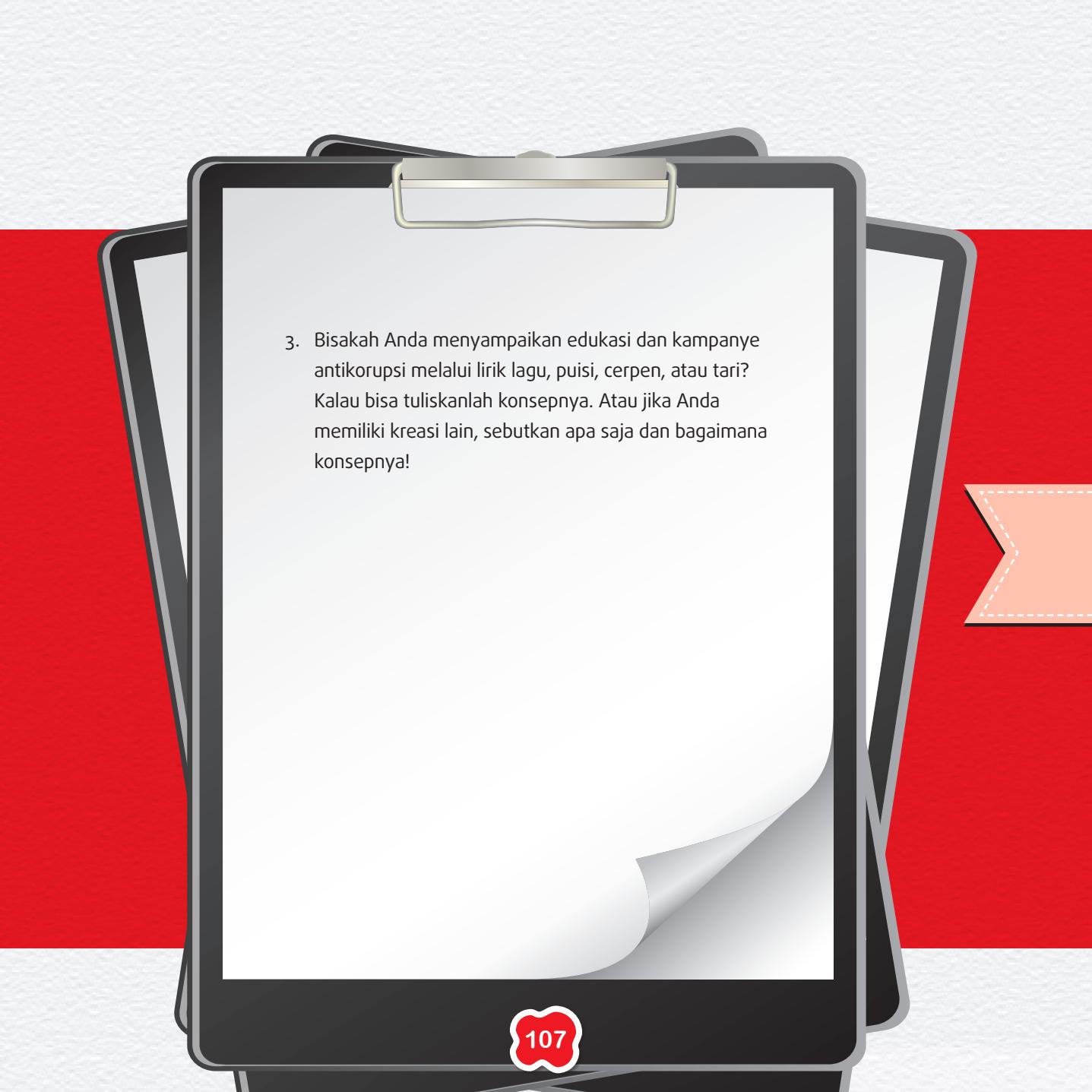
Masih ingat grup band yang amat lekat dengan anak muda, Slank? Melalui kreasinya mencipta lagu, grup ini pun turut berpartisipasi dalam memberantas korupsi di negeri ini. Tetapi memang tidak hanya itu. Jika Anda seorang mahasiswa, Anda juga bisa melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah terdekat. Nyatanya, beberapa badan esekutif mahasiswa (BEM), sudah banyak yang melakukannya.



- 
1. Sebagai panitia malam pentas seni di sekolah/ lingkungan kerja/rumah, konsep apa saja yang bisa Anda terapkan dalam menyisipkan pesan antikorupsi? Tuliskan dengan singkat dan jelas.
 2. Di lingkungan Anda, terdapat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Apa yang bisa Anda lakukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak? Tuliskan dengan singkat dan jelas.



@KPK_RI #SIAPberAksi

- 
3. Bisakah Anda menyampaikan edukasi dan kampanye antikorupsi melalui lirik lagu, puisi, cerpen, atau tari? Kalau bisa tuliskanlah konsepnya. Atau jika Anda memiliki kreasi lain, sebutkan apa saja dan bagaimana konsepnya!

Berlatih untuk berintegritas

Integritas adalah salah satu pilar penting sebagai pembentuk karakter antikorupsi. Secara harafiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan.

Dengan demikian, integritas yang konsepnya telah disebut filsuf Yunani kuno, Plato, dalam *The Republic* sekitar 25 abad silam, adalah tiang utama dalam kehidupan bernegara. Semua elemen bangsa harus memiliki integritas tinggi, termasuk para penyelenggara negara, pihak swasta, dan masyarakat pada umumnya.





Tanpa integritas, seseorang berarti menipu diri sendiri dan orang lain, serta meremehkan setiap usaha keras yang dilakukan.

Di sanalah pentingnya integritas. Jika sudah ditanamkan, tumbuh, dan berkembang, maka nilai-nilai antikorupsi yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran, kesederhanaan, komitmen, tanggung jawab, berani, dan sebagainya pun akan mewarnai setiap sendi kehidupan. Nilai-nilai itu pada akhirnya akan menjadi ruh dalam setiap anggota masyarakat, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalau begitu, sudah saatnya bagi kita semua untuk melatih diri menjadi pribadi berintegritas.

Bagaimana cara agar kita berintegritas?

1. Kita dapat belajar dari tokoh bangsa

Selayaknya bangsa yang paternalistik, masyarakat memerlukan teladan dari sosok pemimpin atau tokoh, dalam setiap level. Entah dalam lingkungan terdekat, keluarga, hingga level kebangsaan. Melalui keteladanan tersebut, masyarakat belajar tentang banyak hal, tidak terkecuali integritas.

Terlebih pada saat ini, ketika banyak pemimpin dan tokoh bangsa justru dilanda krisis integritas. Tak pelak, dalam kondisi seperti ini, keteladanan dari tokoh bangsa yang benar-benar berintegritas tinggi, sangat dibutuhkan.

Dari mereka, masyarakat bisa mengetahui, bagaimana seharusnya memimpin dengan penuh kejujuran. Dari mereka pula, publik dapat mengerti, bagaimana seharusnya menjadikan suatu tugas atau jabatan sebagai amanah. Bukan sarana untuk mempraktikkan *aji mumpung*. Mumpung berkuasa, mumpung menjabat, mumpung, dan sebagainya.



2. Berlatih dari hal-hal kecil dan membiasakan dalam keseharian

Jangan bicara berbicara tentang korupsi kalau masih suka melanggar aturan lalu-lintas, membuang sampah sembarangan, serta melanggar hal-hal lain yang dianggap "sepele."

Mengapa? Karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi yang demikian masif, jika kita tak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran "kecil" seperti itu. Ibarat menyantap bubur panas, tak mungkin sekaligus dilakukan. Harus secara bertahap, mulai dari yang kecil dan terdekat dengan tangan kita.

Dan, memang begitulah melatih integritas.

- 
1. Di lingkungan Anda masih kental budaya memberi uang kepada petugas untuk mempercepat proses pelayanan KTP dan Kartu Keluarga. Bagaimana Anda menilai hal tersebut? Upaya apa yang bisa Anda lakukan untuk memberantas perilaku tersebut?
 2. Bagaimana penilaian Anda terhadap seseorang yang memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK? Upaya apa yang bisa Anda lakukan?



@KPK_RI #SIAPberAksi

- 
3. Menurut Anda, apakah wajar jika sikap seorang istri tidak menanyakan kepada suami, ketika suami memberikan uang lebih dari penghasilannya? Kemukakan alasan Anda.
4. Menurut Anda, adakah hubungan antara perilaku berlalu lintas dengan korupsi?



@KPK_RI #SIAPberAksi

Ajak yang lain untuk melakukan hal yang sama

Jangan sepelekan pameo berikut, "Kejahatan terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir."

Itu sebabnya, Anda tidak bisa berperan sendirian. Anda harus mengajak orang-orang yang berada di lingkungan terdekat untuk melakukan hal yang sama. Siapapun mereka. Entah keluarga, sahabat, teman di sekolah, kampus, atau rekan kerja. Anda harus mengajak mereka.

Bagaimana caranya? Tentu saja kembali kepada pola kampanye yang sudah dijelaskan. Melalui upaya tersebut, ajaklah pula rekan-rekan yang lain untuk berperan pula dalam agen perubahan antikorupsi. Pada saatnya, mereka pun akan berperan dalam ketiga strategi, yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye.

Bayangkan, jika semua agen perubahan antikorupsi bersikap seperti Anda, maka pemberantasan korupsi pun akan menggurita sampai akhirnya semua orang di negeri ini bersikap antikorupsi.



- 
1. Sebelum mengajak orang lain, Anda bisa mengajak keluarga untuk memiliki sikap yang sama yakni antikorupsi. Tuliskan, apa saja yang bisa Anda lakukan.
 2. Apakah Anda memiliki akun di media sosial? Jika iya, hal-hal apa yang bisa Anda lakukan untuk mengajak relasi ANDa di media sosial untuk turut memberantas korupsi?



@KPK_RI #SIAPberAksi

- 
5. Setiap bulan, lingkungan Anda secara rutin mengadakan rapat warga. Bisakah Anda memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai ajang untuk mengajak warga agar bersikap antikorupsi? Tuliskan upaya-upaya yang bisa Anda lakukan.



@KPK_RI #SIAPberAksi

Sekarang, Jangan Ditunda!

Menerjunkan diri ke dalam pemberantasan korupsi, tak ubahnya seperti pengembalaan yang menantang. Harus seksama ketika mempelajari peta dan menentukan strategi, namun berubah menjadi sangat menyenangkan ketika berada di dalamnya. Semua menjadi mudah dan bisa dilakukan siapapun. Yang penting tekad, kemauan, dan strategi yang tepat sesuai potensi diri dan minat. Tentu saja yang juga harus diingat, empat tips pemberantasan korupsi itu tadi.

Jadi, mau pilih peran apa? Peran represif, perbaikan sistem, atau edukasi dan kampanye? Apapun pilihannya, jangan ditunda. Karena peran Anda sangat besar artinya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Bayangkan, jika masing-masing dari Anda berhasil mengajak yang lain untuk berbuat hal yang sama, dan begitu pula seterusnya, maka kekuatan pemberantasan korupsi bisa menjadi deret ukur yang selalu berlipat-lipat.

Kalau begitu, mari langkahkan kaki sekarang juga. Bersama awan menggantung, mari menjadikan Indonesia sebagai negeri impian yang bebas dari korupsi. Mari menjadikannya nyata, tidak lagi sebatas harapan dan cita-cita.

Bersama KPK,
mari kita wujudkan negeri impian:
“Indonesia yang Adil, Makmur, dan
Sejahtera - Bebas dari korupsi”
dengan cara mudah dan
menyenangkan

Daftar Referensi

1. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1
2. Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk
3. Atlas of Indonesia
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Indonesia
4. Wilayah Indonesia Makin Luas
<http://inafinance.com/2013/01/19/wilayah-indonesia-makin-luas/>
5. Keanekaragaman Hayati
http://id.wikipedia.org/wiki/Keanekaragaman_hayati
06. Kekayaan Laut Indonesia 6 Kali APBN
<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/2242-kekayaan-laut-indonesia-6-kali-apbn.html>
07. Indonesia Punya 746 Bahasa Daerah
<http://www.antarabali.com/berita/45818/indonesia-punya-746-bahasa-daerah>
08. Quo Vadis Kekayaan Laut
<http://news.detik.com/read/2009/08/03/095217/1176181/471/1/quo-vadis-kekayaan-laut>
09. Potensi Tambang Indonesia
<http://www.hpli.org/tambang.php>
11. Pendapatan perkapita Indonesia 2013 US\$4.000
<http://whatindonews.com/id/post/2856>
12. Pendapatan per kapita
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita
13. Rata-rata Pendidikan Orang Indonesia 5,8 Tahun atau Tak Lulus SD
<http://www.merdeka.com/peristiwa/rata-rata-pendidikan-orang-indonesia-58-tahun-atau-tak-lulus-sd.html>

14. Pemerintah Indonesia Canangkan Gerakan Anti Putus Sekolah
<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-canangkan-gerakan-anti-putus-sekolah/1601826.html>
15. Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2004 - 2013
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=1
16. Daftar negara menurut tingkat pengangguran
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_tingkat_pengangguran
17. AKI, Indikator Kualitas Kesehatan Masyarakat
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/02/238763/AKI-Indikator-Kualitas-Kesehatan-Masyarakat>
18. Polri: Kejahatan di Indonesia Terjadi Setiap 91 Detik
<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/12/26/polri-kejahatan-di-indonesia-terjadi-tiap-91-detik>
19. Apindo: Daya Beli Masyarakat Daerah Rendah
<http://www.apindo.or.id/index.php/berita-&-artikel/news/1084>
20. Daya Saing 5 Sektor Prioritas Masih Rendah, Produk China Geser Produk Lokal
<http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/publikasi/berita/daya-saing-5-sektor-prioritas-masih-rendah-produk-china-geser-produk-lokal/>
21. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2012
<http://dikdas.kemdikbud.go.id/application/media/file/Produk%20Hukum/Permendikbud%20Nomor%2061%20Tahun%202012.pdf>
22. 21.313 Km jalan di Indonesia rusak dan di bawah standar
<http://www.merdeka.com/uang/21313-km-jalan-di-indonesia-rusak-dan-di-bawah-standar.html>
23. 10.211 Desa di RI Belum Dapat Listrik, Ini Alasan Bos PLN
<http://finance.detik.com/read/2013/06/13/142411/2272504/10211-desa-di-ri-belum-dapat-listrik-ini-alasan-bos-pln>

24. Peneliti UGM: Biaya Eksplisit Korupsi Rp 168,19 Triliun
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/05/mj5krr-peneliti-ugm-biaya-eksplisit-korupsi-rp-16819-triliun>
25. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat
<http://acch.kpk.go.id/rekapitulasi-laporan-pengaduan>
26. Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi
<http://acch.kpk.go.id/statistik>
27. Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan
<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>
28. Penanganan TPK Berdasarkan Jenis Perkara
<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>
29. Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),
<http://acch.kpk.go.id/rekapitulasi-lhkp>
30. Gratifikasi Berdasarkan Status Kepemilikan
<http://acch.kpk.go.id/gratifikasi-berdasarkan-status-kepemilikan>